



## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN (STUDI ADA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA)

Hariz Muftie Hidayat<sup>1</sup>, Ramdany<sup>2</sup>, Samukri<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> STIE Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Akuntansi email: [muftie.school@gmail.com](mailto:muftie.school@gmail.com)

<sup>2)</sup> STIE Muhammadiyah Jakarta email: [ramdany2012@gmail.com](mailto:ramdany2012@gmail.com)

<sup>3)</sup> STIE Muhammadiyah Jakarta email: [samukriakuntan@yahoo.co.id](mailto:samukriakuntan@yahoo.co.id)

Korespondensi : Ramdany, email : [ramdany2012@gmail.com](mailto:ramdany2012@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Ada lima faktor yang diidentifikasi mempengaruhi penyerapan anggaran, yaitu dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan dan uang persediaan. Penelitian ini kualitatif deskriptif. Sampel penelitian dari para pegawai di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta yang memiliki hubungan erat dengan proses siklus anggaran di kantor masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kualitas sumber daya, dan dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan informasi dalam perumusan perbaikan maupun perubahan kebijakan dalam hal penyerapan anggaran secara umum.

**Kata Kunci:** Penyerapan Anggaran, Perencanaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Uang Persediaan.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the factors that influence budget absorption in the DKI Jakarta Regional Office of DJKN. There are five factors identified that affect budget absorption, namely planning documents, administrative records, HR competencies, procurement documents and money supplies. This research is descriptive qualitative. The research sample is from employees in the DKI Jakarta Regional Office of DJKN who have a close relationship with the budget cycle process in their respective offices. The results showed that planning documents, administrative records, quality of resources, and procurement documents had no effect on budget absorption. However, the money supply has a positive effect on budget absorption. The main contribution of this research is to provide information in the formulation of improvements and policy changes in terms of budget absorption in general.*

**Keywords:** Budget Absorption, Planning, Administration, Human Resources, Procurement, Money Supply.

Naskah diterima : 20/04/2022, Naskah dipublikasikan : 30/04/2022

## **PENDAHULUAN**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode. Anggaran disusun dengan menghubungkan hasil kinerja dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Adanya ukuran kinerja, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai organisasi menjadi lebih jelas [1]. Oleh karena itu penyusunan anggaran yang berbasis kinerja diharapkan menghasilkan anggaran yang lebih berkualitas [2]. Anggaran berbentuk dokumen formal kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan yang diperlukan.

Sistem penganggaran di Pemerintahan saat ini menggunakan konsep penganggaran berbasis kinerja. Hal ini diharapkan guna mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur dan andal. Berdasarkan sistem ini seluruh penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja.

Setiap tahun Pemerintah membuat sebuah dokumen perencanaan keuangan tahunan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada UU No 17 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 [3], APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan [4]. Anggaran belanja dalam hal ini secara umum diturunkan kepada satuan satuan kerja di tiap Kementerian atau lembaga terkait dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pelaksanaan realisasi dari anggaran belanja tersebut umumnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi serta fasilitas umum lainnya. Peran Pemerintah dalam penggunaan anggaran belanja ini memiliki *multiplier effect* kepada masyarakat. Contohnya apabila belanja Pemerintah pada tahun berjalan meningkat maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

Hal ini dapat dilaksanakan apabila belanja Pemerintah dilakukan secara efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa kendala sehingga tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat ataupun masyarakat tidak mencapai hasil yang optimal. Salah satu contohnya yang terjadi di lingkungan satuan kerja Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta dengan menumpuknya realisasi anggaran di akhir tahun khususnya di kuartal akhir. Proses penyerapan yang kurang optimal di awal hingga pertengahan tahun menimbulkan deviasi target penyerapan anggaran di KPKNL Jakarta IV belum sesuai dengan target penyerapan anggaran yang disusun. Faktor lain yang menyebabkan adanya deviasi penyerapan anggaran adalah adanya revisi anggaran seperti relokasi anggaran wabah pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Anggaran dan Penganggaran**

Anggaran merupakan salah satu hal yang utama disusun ketika suatu organisasi memasuki awal tahun baru. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 14 ayat 1 [3] dijelaskan dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja ini dan anggaran ini disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dengan disertai prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang telah disusun.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009) [5]. Pada prakteknya terdapat hubungan yang erat antara anggaran, perencanaan dan pengendalian, dimana ketiga unsur tersebut digunakan untuk melihat ke masa belakang, masa kini dan masa depan.

### **Penyerapan Anggaran**

Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis selisih kinerja aktual dengan yang dianggarkan [5]. Penyerapan anggaran merupakan salah satu dari siklus APBN. Penyerapan dilakukan sepanjang tahun anggaran, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Tahap ini dimulai ketika Undang-Undang APBN disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu, dokumen pelaksanaan anggaran akan disahkan oleh Menteri Keuangan, dan disampaikan kepada Menteri/lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.

Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2004 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan [6]. Pengeluaran Pemerintah (G) dalam konteks ekonomi makro adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan barang konsumsi rumah tangga (C), permintaan investasi (I), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis, dapat dirumuskan  $PDB (Y) = C + I + G + (X-M)$  [7].

### **Sistem Penganggaran di Pemerintah**

Sistem penganggaran di Pemerintah Indonesia dikenal juga sebagai Siklus APBN [8]. Siklus ini dimulai pada periode satu tahun sebelum tahun anggaran. Tahap pertama dalam siklus ini adalah tahap perencanaan dan penganggaran. Tahap ini merupakan tahap penyiapan konsep pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro, dengan mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Kegiatan perencanaan anggaran dilakukan oleh Kementerian negara/lembaga yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Dokumen ini mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Penyusunan rencana kerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah [9] dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL [10].

Tahap kedua dari siklus APBN adalah pembahasan APBN. Pembahasan dilakukan antara Kementerian/Lembaga selaku *Chief of Operation Officer* (COO) dengan Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* (CFO). Nantinya, akan dihasilkan Rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan RUU APBN antara Pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.

Tahap ketiga yaitu Penetapan APBN. RUU APBN dan Nota Keuangan yang telah dipelajari oleh para fraksi DPR kemudian diserahkan kepada Presiden. Pandangan dari tiap fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan terkait asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan dan rencana kebijakannya. Kemudian setelah itu, APBN akan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN.

Tahap keempat yaitu pelaksanaan anggaran. Tahap ini berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember di tahun anggaran. Tahap terakhir adalah pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap ini

berlangsung sejalan dan bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN. Kementerian/Lembaga dan bendahara umum negara melakukan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran**

- *Dokumen Perencanaan*

Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 [11], yang dimaksud dokumen perencanaan anggaran adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L. RKA-K/L ini adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

- *Pencatatan Administrasi*

Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya [12]. Administrasi dapat diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretariatan, menghimpun, mengolah yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, mengadakan, mengirim, menyimpan [13].

- *Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)*

Kualitas SDM dalam hal ini aparat sipil negara (ASN) sebagai aparat pengelola keuangan menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran [14]. Kualitas SDM yang baik di dalam sistem Pemerintahan memungkinkan roda birokrasi berjalan lebih cepat dan lancar. Tujuan dari pelayanan ASN adalah meningkatkan kepuasan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaik kepada masyarakat, maka kinerja sektor publik akan meningkat [15].

- *Dokumen Pengadaan*

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 [16], Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

- *Uang Persediaan*

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 (2012) [22], kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Kas adalah aktiva lancar yang digunakan sebagai media pembayaran, sebagai dasar pengukuran akuntansi, dan sebagai laporan bagi seluruh pos lainnya [18].

#### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

##### **Pengaruh Dokumen Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran**

Dalam pelaksanaan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan sebagaimana pelaksanaan APBN disebut Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA). Penyerapan anggaran berdasarkan DIPA yang merupakan dokumen dari perencanaan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Dokumen Perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

**Pengaruh Pencatatan Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran**

Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan satu atau banyak orang terlibat di dalamnya. Administrasi dalam penyerapan anggaran berperan sangat penting mulai dari proses perencanaan sampai dengan penyerapan anggaran [19]. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pencatatan Administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

**Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Penyerapan Anggaran**

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor penentu dari penyerapan anggaran suatu instansi. Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kualitas anggaran instansi, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas anggaran instansi [1]. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

**Pengaruh Dokumen Pengadaan Terhadap Penyerapan Anggaran**

Sebelum tahun 2008 pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem ini membutuhkan interaksi secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. Namun dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional ditemukan berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut sebagian besar pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa [20]. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Dokumen Pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

**Pengaruh Uang Persediaan Terhadap Penyerapan Anggaran**

Uang Persediaan (UP) merupakan uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, dan untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS [21]. UP dapat diajukan dalam bentuk berupa UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (berlaku sejak 1 Juli 2019). Penggunaan UP dalam jumlah yang tepat dan terukur, kita penyerapan anggaran pada suatu instansi dapat efektif dan efisien atau juga sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Uang Persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bersinggungan langsung dengan penyerapan anggaran di Kanwil DJKN DKI Jakarta yang berjumlah 24 orang. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian deskriptif ini adalah metode survei berupa kuesioner. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

**Variabel Penelitian**

Variabel Independen dalam penelitian ini ada lima yaitu dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dokumen pengadaan, uang persediaan. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent yaitu penyerapan anggaran.

### Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner. Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan hasil keterangan dari narasumber/informan berupa tulisan. Kuesioner dilaksanakan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis dengan indikator tertentu kepada narasumber/informan, berdasarkan tingkat keahlian atau pengalaman narasumber/informan terkait penyerapan anggaran di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta. Mengingat keadaan pandemic *COVID-19* yang masih berlangsung ketika penelitian ini dilakukan, seluruh proses permintaan kuesioner dilakukan secara daring melalui bantuan layanan *Google Forms* kepada para narasumber/informan.

### HASIL PENELITIAN

#### Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditampilkan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian antara lain minimum, maksimum, standar deviasi dan mean. Adapun hasilnya dapat disajikan dalam tabel 1 dan 2.:

Tabel 1.

Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Kisaran Aktual	Mean Aktual	Std. Deviasi
PA (Y)	19	4-14	7,37	2,006
DP (X1)	19	8-20	12,58	3,168
PAD (X2)	19	5-13	9,05	2,094
SDM (X3)	19	3-9	5,37	1,862
DPEN (X4)	19	3-10	5,00	1,826
UP (X5)	19	4-12	6,00	2,357

Sumber: Data Diolah

Tabel 5.2.

Persentase Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Pilihan Jawaban	Variabel					
	PA (Y)	DP (X1)	PAD (X2)	SDM (X3)	DPEN (X4)	UP (X5)
1	25,00%	50,66%	32,63%	42,11%	50,88%	65,79%
2	71,05%	43,42%	55,79%	36,84%	33,33%	19,74%
3	1,32%	4,61%	9,47%	21,05%	14,04%	13,16%
4	0,00%	0,66%	2,11%	0,00%	1,75%	1,32%
5	2,63%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Diolah

#### Hasil Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner yang diajukan. Suatu variabel dianggap sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel yang disediakan pada kuesioner penelitian ini adalah valid.

Tabel 3.  
Uji Validitas

No.	Variabel	Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Keterangan
1	Penyerapan Anggaran (Y)	Y1	.894**	Valid
		Y2	.837**	Valid
		Y3	.480*	Valid
		Y4	.647**	Valid
2	Dokumen Perencanaan (X1)	X1.1	.497*	Valid
		X1.2	.697**	Valid
		X1.3	.554*	Valid
		X1.4	.633**	Valid
		X1.5	.703**	Valid
		X1.6	.731**	Valid
		X1.7	.548*	Valid
		X1.8	.481*	Valid
3	Pencatatan Administrasi (X2)	X2.1	.748**	Valid
		X2.2	.716**	Valid
		X2.3	.654**	Valid
		X2.4	.754**	Valid
		X2.5	.584**	Valid
4	Kompetensi SDM (X3)	X3.1	.801**	Valid
		X3.2	.723**	Valid
		X3.3	.862**	Valid
5	Dokumen Pengadaan (X4)	X4.1	.743**	Valid
		X4.2	.874**	Valid
		X4.3	.871**	Valid
6	Uang Persediaan (X5)	X5.1	.818**	Valid
		X5.2	.715**	Valid
		X5.3	.772**	Valid
		X5.4	.749**	Valid

**Sumber: Data Diolah**

### Hasil Uji Reliabilitas

Suatu instrument dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai 0,70 maka instrument yang digunakan reliabel. Berdasar tabel 4. dibawah, dapat dibuktikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini disimpulkan dari nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

Tabel 4  
Uji Reliabilitas

I. VARIABEL	II. CRONBACH'S ALPHA	III. KETERANGAN
Penyerapan Anggaran (Y)	0.7074	Reliabel
Dokumen Perencanaan (X1)	0.7339	Reliabel
Pencatatan Administrasi (X2)	0.7067	Reliabel
Kompetensi SDM (X3)	0.7133	Reliabel
Dokumen Pengadaan (X4)	0.7711	Reliabel
Uang Persediaan (X5)	0.7540	Reliabel

**Sumber: Data Diolah****Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Sminov* (K-S). Dasar pengambilan keputusannya adalah nilai  $Sig \geq 0,05$  maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai  $Sig \leq 0,05$ , maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Berdasar Tabel 5. dapat dibuktikan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 5  
Uji Normalitas

	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	
	<i>Asymp. Sig. (2 tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
Dokumen Perencanaan (X1)	.000	Tidak Normal
Pencatatan Administrasi (X2)	.200*	Normal
Kompetensi SDM (X3)	.200*	Normal
Dokumen Pengadaan (X4)	.200*	Normal
Uang Persediaan (X5)	.004	Tidak Normal

**Sumber: Sumber: Data Diolah****Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas adalah uji yang bertujuan mengetahui suatu hubungan antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance/Variance Inflation Faktor* (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, maka model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.  
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dokumen Perencanaan (X1)	0.69511	1.438614	Bebas Multikolinearitas
Pencatatan Administrasi (X2)	0.67941	1.471859	Bebas Multikolinearitas
Kompetensi SDM (X3)	0.67142	1.489376	Bebas Multikolinearitas
Dokumen Pengadaan (X4)	0.64975	1.539041	Bebas Multikolinearitas
Uang Persediaan (X5)	0.74973	1.333813	Bebas Multikolinearitas

**Sumber: Data Diolah**

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel tidak memiliki nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Dengan demikian, model regresi pada persamaan ini bebas dari multikolinearitas.

### Hasil Uji Hipotesis

Hasil dari analisis regresi linier berganda dalam penelitian disajikan pada tabel 7.

Tabel 7.  
Uji Hipotesis

Variabel	Nilai Koefisien	t	Sig.	Keterangan
Dokumen Perencanaan (X1)	-0.1545	0.522	0.610	Ditolak
Pencatatan Administrasi (X2)	0.1208	-1.883	0.082	Ditolak
Kompetensi SDM (X3)	-0.2767	-1.597	0.134	Ditolak
Dokumen Pengadaan (X4)	-0.5077	-0.611	0.552	Ditolak
Uang Persediaan (X5)	0.5244	2.438	0.030	Diterima

**Sumber: Data Diolah**

Nilai F = 2.564; N = 19; R<sup>2</sup> = 0.547; Adj R<sup>2</sup> = 0.37253; Signifikansi = 0.045

### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>1</sub>

#### H<sub>1</sub>: Dokumen Perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil uji signifikansi variabel dokumen perencanaan (0.610) lebih dari tingkat signifikansi (0,05), maka hipotesis 1 ditolak. Berarti, dokumen perencanaan di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta tidak mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel dokumen perencanaan tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Dokumen perencanaan tidak berpengaruh dikarenakan telah memadai dan lengkapnya peraturan yang diterbitkan di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta terkait dokumen perencanaan, sehingga penyerapan anggaran diharuskan mengikuti prosedur yang ada.

### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>2</sub>

#### H<sub>2</sub>: Pencatatan Administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil uji signifikansi variabel pencatatan administrasi (0.082) lebih dari tingkat signifikansi (0,05), maka hipotesis 2 ditolak. Berarti, pencatatan administrasi di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta tidak mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel pencatatan administrasi tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi tidak berpengaruh dikarenakan telah memadai dan lengkapnya peraturan

yang diterbitkan di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta terkait pencatatan administrasi, sehingga penyerapan anggaran diharuskan mengikuti prosedur yang ada.

### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>3</sub>

#### H<sub>3</sub>: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil uji signifikansi variabel kompetensi SDM (0.134) lebih dari tingkat signifikansi (0,05), maka hipotesis 3 ditolak. Berarti, baik buruknya kompetensi SDM di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta tidak mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel kompetensi SDM tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Kompetensi SDM tidak berpengaruh disebabkan telah memadai dan lengkapnya kemampuan SDM yang berada di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta, dengan disediakannya pelatihan dan pendidikan kepada pegawai, sehingga penyerapan anggaran berhasil dilakukan dengan baik.

### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>4</sub>

#### H<sub>4</sub>: Dokumen Pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil uji signifikansi variabel dokumen pengadaan (0.552) lebih dari tingkat signifikansi (0,05), maka hipotesis 4 ditolak. Berarti, baik buruknya dokumen pengadaan di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta tidak mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel dokumen pengadaan tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Dokumen pengadaan tidak berpengaruh dikarenakan telah memadai dan lengkapnya kelengkapan dokumen yang harus disediakan ketika melaksanakan pengadaan, sehingga penyerapan anggaran diharuskan memenuhi prosedur yang ada.

### Hasil Pengujian Hipotesis H<sub>5</sub>

#### H<sub>5</sub>: Uang Persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil uji signifikansi variabel uang persediaan (0.030) lebih dari tingkat signifikansi (0,05), maka hipotesis 5 diterima. Berarti, baik buruknya uang persediaan di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel uang persediaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

### Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 8  
Uji Analisis Regresi Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.095	2.273		4.001	.002
Dokumen Perencanaan (X1)	-.154	.142	-.244	-1.089	.296
Pencatatan Administrasi (X2)	.121	.217	.126	.557	.587
Kompetensi SDM (X3)	-.277	.245	-.257	-1.127	.280
Dokumen Pengadaan (X4)	-.508	.254	-.462	-1.995	.067
Uang Persediaan (X5)	.524	.184	.616	2.857	.013

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel, maka hasil regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 9.095 - 0.1545X_1 + 0.121X_2 - 0.277X_3 - 0.508X_4 + 0.524X_5 + e$$

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasar hasil analisis, nilai koefisien determinasi *Adjusted R*<sup>2</sup> = 0.37253. Hal ini berarti bahwa 37,25% varian variabel penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel dokumen perencanaan (X1), pencatatan administrasi (X2), kompetensi SDM (X3), dokumen pengadaan (X4), uang persediaan (X5). Sedangkan sisanya sebesar 62,75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk ke dalam variabel penelitian.

**Hasil Uji F**

Hasil uji F pada tabel 4.10 diperoleh nilai  $F = 2,564$  dengan nilai signifikansi sebesar  $P \text{ value} = 0.045$  yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji, dan kelima variabel mampu menjelaskan fenomena penyerapan anggaran pada lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.

**PEMBAHASAN**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan dengan persentase frekuensi responden dengan skala 2 atau sebesar 71,05% yang berarti penyerapan anggaran pada kantor di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta dapat dikatakan tergolong cukup baik atau masih tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama bahwa dokumen perencanaan memiliki pengaruh terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini sejalan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan jawaban responden yang diterima, pertanyaan kuesioner yang dijawab dengan persentase terbesar dengan pilihan jawaban pada skala 1 sebesar 50,66%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan pada kantor di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah cukup baik sehingga menghasilkan penyerapan yang baik juga.

Kedua hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan administrasi memiliki pengaruh terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini sejalan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa pencatatan administrasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan jawaban responden yang diterima pertanyaan kuesioner yang dijawab dengan persentase terbesar dengan pilihan jawaban pada skala 2 sebesar 55,79%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan administrasi pada kantor di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah cukup baik sehingga menghasilkan penyerapan yang baik juga.

Ketiga kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini sejalan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan jawaban responden yang diterima. Pertanyaan kuesioner yang dijawab dengan persentase terbesar dengan pilihan jawaban pada skala 1 sebesar 42,11%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM pada kantor di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah cukup baik sehingga menghasilkan penyerapan yang baik juga.

Keempat dokumen pengadaan memiliki pengaruh terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini sejalan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan jawaban responden yang diterima persentase terbesar dengan pilihan jawaban pada skala 1 sebesar 50,88%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen pengadaan pada kantor di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah cukup baik sehingga menghasilkan penyerapan yang baik juga.

Kelima uang persediaan memiliki pengaruh terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini sejalan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa uang persediaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan jawaban responden yang diterima persentase terbesar dengan pilihan jawaban pada skala 1 sebesar 65,79%. Berdasarkan data tersebut dapat



disimpulkan bahwa uang persediaan pada kantor di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah cukup baik sehingga menghasilkan penyerapan yang baik juga.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kualitas sumber daya, dan dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini dapat terjadi karena sistem untuk meningkatkan anggaran di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah cukup optimal sehingga sistem dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kualitas sumber daya, dan dokumen pengadaan telah menggunakan sistem yang baku sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

Uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran karena ketersediaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Semakin tinggi ketersediaan uang persediaan semakin tinggi penyaluran dana anggaran dan akhirnya mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran itu sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Octariani, D. A. (2017). *Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran SKPD (Suatu Pengujian Struktural)*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(1),

Robinson, M. a. (2006). *Does Performance Based Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature*. Washington, DC: IMF Working Paper No. WP/05/210.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. Jakarta: Republik Indonesia

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Republik Indonesia

Dumairy. (2006). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (2022)  
<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html>. Retrieved from <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html>



Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Jakarta: Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Siagian, P. S. (1996). Bunga Rampai Manajemen Modern. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Dewi, I. C. (2011). Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Zarinah M., D. &. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 5(1).

Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 atas Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Standar Akuntansi Keuangan, Edisi Revisi 2012. Jakarta: Salemba 4.

Kieso, D. E. (2011). *Intermediate Accounting*. Washington DC: American Psychological Association.

Yanuariza, A. H. (Desember 2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau. *Jurnal Ekonomi - JE* (2019), Vol.27(4), pp 409-423, 2.

Mulyono, P. E. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 178/PMK.05/2018 Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Secara Utuh pada K/L. Jakarta: Kementerian Keuangan..

Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.